

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kerangka Teori	6
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Parlemen	15
1. Sistem Parlemen Unikameral	15
2. Sistem Parlemen Bikameral	16
B. Bikameral dalam Negara Kesatuan	17
1. Parlemen Philipina	17
2. Parlemen Bikameral di Indonesia	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	24
B. Sumber Pengumpulan Bahan Hukum	25
C. Pengolahan Bahan Hukum	26
D. Analisa Bahan Hukum	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Sistem Parlemen Bikameral menurut UUD 1945	27
1. Sejarah Parlemen Bikameral di Indonesia	27
2. Pembentukan DPD	34
3. Kedudukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	38
4. Keanggotaan DPD	38
5. Kewenangan dan Fungsi DPD	43
6. Kewenangan DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	46

B. Analisa terhadap Efektifitas Pelaksanaan Fungsi DPD	
Menuju Sistem Parlemen Bikameral di Indonesia	58
1. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi	59
2. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	68
3. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Anggaran	72
4. Penguatan Fungsi DPD	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	84
DAFTAR LAMPIRAN	87